



**Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Jakarta**

Homepage: <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps>  
Vol. 3 No. 1, Desember 2025, halaman: 240-255  
E-ISSN: xxxx-xxxx



# Manajemen Keuangan Pendidikan Berbasis Filantropi Untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan: Systematic Literature Review Berbasis Google Scholar dan Scopus (2015-2025)

Mushthofa Abdul Majiid<sup>1</sup>, Teguh Trianung Djoko Susanto<sup>2</sup>, Muh. Takdir<sup>3</sup>, Linda Ika Mayasari<sup>4</sup>, Aldo Redho Syam<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>\*Email penulis koresponden: [mushthofa.abdul@mhs.unj.ac.id](mailto:mushthofa.abdul@mhs.unj.ac.id)

## Riwayat Artikel

Submitted: 10-12-2025  
Accepted: 20-12-2025  
Published: 31-12-2025

**Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta**  
diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Jakarta



## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis prinsip filantropi yang dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Filantropi pendidikan dipandang sebagai pendekatan strategis dalam menjawab keterbatasan dana, ketimpangan akses, dan ketergantungan pada sumber pembiayaan tunggal dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap publikasi tahun 2015–2025 yang membahas manajemen keuangan pendidikan dan filantropi pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keuangan pendidikan yang mengintegrasikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai filantropi dapat meningkatkan kemandirian finansial lembaga pendidikan, memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia. Pengelolaan dana filantropi berbasis digital juga memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan model tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan berbasis nilai sosial-keagamaan sebagai fondasi keberlanjutan pendidikan nasional.

**Kata kunci:** *Education Financial Management, Philanthropy, Educational Access, Educational Quality, Accountability*

## Abstract

*This study aims to develop an education financial management system based on philanthropic principles to enhance access to and quality of education. Educational philanthropy is viewed as a strategic approach to addressing funding limitations, unequal access to education, and excessive reliance on a single source of government financing. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method of publications from 2015 to 2025 that examine education financial management and Islamic educational philanthropy. The findings indicate that the implementation of an education financial management system integrating principles of efficiency, transparency, accountability, and philanthropic values can strengthen the financial independence of educational institutions, expand access to education for vulnerable groups, and contribute to the improvement of human resource quality. Furthermore, digitally based philanthropic fund management enhances transparency and public trust. Therefore, a professional, accountable, and socially and religiously value-based financial governance model is required as a foundation for the sustainability of national education.*

**Keywords:** *Education Financial Management, Philanthropy, Educational Access, Educational Quality, Accountability*

## PENDAHULUAN

Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia hingga kini masih menjadi problem struktural yang serius, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasinya. Menurut kajian (Manik Sidauruk et al., 2025) menunjukkan bahwa disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat jelas terlihat dalam ketersediaan fasilitas belajar, pemerataan tenaga pendidik, dan kualitas manajemen sekolah. Hasil penelitian (Muttaqin, 2020) menguatkan bahwa kesenjangan tersebut juga terjadi antara lembaga pendidikan formal dan nonformal, termasuk madrasah serta pesantren kecil di daerah terpencil yang seringkali beroperasi tanpa dukungan sumber daya memadai. Kondisi ini mempertegas bahwa pendekatan kebijakan yang ada belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara setara.

Sejumlah studi menyoroti bahwa persoalan pendistribusian bantuan pemerintah masih jauh dari optimal. Riset yang dipublikasikan melalui (Simanjuntak et al., 2024) mengungkap bahwa distribusi Kartu Indonesia Pintar (*KIP*) masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sasaran penerima yang belum tepat, keterlambatan penyaluran, dan nilai bantuan yang dinilai terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Penelitian pada tingkat sekolah dasar (Fitriana et al., 2025; Pugu et al., 2025) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah pedesaan sering tertinggal dalam hal ketersediaan sarana belajar, kualitas guru, kesiapan teknologi, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kekurangan tersebut memengaruhi langsung kualitas proses dan hasil belajar siswa.

Temuan serupa juga diungkapkan dalam kajian (Mujiburrohman & Putri, 2024; Pugu et al., 2025), yang menyatakan bahwa meskipun program BOS dan PIP mampu meringankan beban ekonomi pendidikan dalam jangka pendek, efektivitasnya menjadi sangat terbatas apabila tidak dibarengi dengan manajemen pendanaan yang kuat dan distribusi sumber daya yang adil. Minimnya infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar kompeten, serta penerapan kebijakan yang tidak konsisten memperburuk ketimpangan antar wilayah. Kondisi ini berdampak pada meluasnya kesenjangan mutu pendidikan yang kemudian menghambat mobilitas sosial dan memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi. (Liyana, 2023) bahkan mencatat bahwa ketimpangan pendidikan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena mengurangi kapasitas produktif penduduk.

Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan lembaga pendidikan mencapai tujuan peningkatan mutu. Menurut (Istikomah & Minarti, 2025), pengelolaan keuangan yang efektif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan karena mencakup aspek perencanaan, alokasi, dan pengawasan dana secara tepat. Lemahnya manajemen keuangan sering kali menyebabkan kebijakan pembiayaan tidak tepat sasaran dan tidak sejalan dengan kebutuhan riil sekolah. Banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki sistem keuangan berbasis data atau transparansi laporan yang terstandar, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan penyalahgunaan dana. Ketika dana pendidikan tidak dikelola dengan baik, maka proses pembelajaran, pengembangan guru, maupun perawatan sarana pendidikan menjadi terhambat. (Ikhsan et al., 2025) menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam peningkatan mutu karena dana yang cukup dan dikelola dengan baik memungkinkan lembaga pendidikan berinovasi dan bertransformasi. Dengan demikian, pembenahan sistem manajemen keuangan menjadi langkah mendesak agar lembaga pendidikan dapat menjalankan perannya secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dalam konteks yang lebih luas, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia masih sangat bergantung pada alokasi anggaran pemerintah. Ketergantungan ini menyebabkan lembaga pendidikan kesulitan untuk mandiri dalam mengelola kebutuhan operasional dan pengembangan mutu. Ketika anggaran publik terbatas, sektor pendidikan sering kali tidak mendapatkan prioritas yang memadai dibandingkan sektor lain seperti infrastruktur atau ekonomi. Padahal, kebutuhan dana pendidikan meningkat setiap tahun seiring dengan perkembangan teknologi pembelajaran dan peningkatan tuntutan kompetensi guru. Kondisi ini menuntut adanya diversifikasi sumber pembiayaan melalui pendekatan inovatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di

sinilah konsep filantropi pendidikan hadir sebagai alternatif strategis yang potensial untuk mengisi kesenjangan pendanaan. Filantropi memungkinkan masyarakat luas berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dunia pendidikan, baik melalui donasi langsung, program beasiswa, maupun wakaf produktif. Dengan melibatkan nilai-nilai sosial dan spiritual, filantropi menjadi mekanisme yang tidak hanya mengandalkan aspek material, tetapi juga menguatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan pendidikan.

Filantropi, dalam konteks sosial dan keagamaan, berakar kuat pada tradisi solidaritas dan tolong-menolong antar manusia. Dalam ajaran Islam, praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) telah menjadi bagian penting dari sistem sosial yang bertujuan menegakkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Sejarah mencatat bahwa lembaga-lembaga pendidikan besar seperti Universitas Al-Azhar di Kairo mampu bertahan selama berabad-abad karena dukungan wakaf pendidikan. Prinsip filantropi tidak hanya berbicara tentang pemberian, tetapi juga tentang sistem pengelolaan dana sosial yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Di Indonesia, lembaga-lembaga filantropi seperti Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Dompot Dhuafa, dan Lazismu telah membuktikan peran strategisnya dalam membantu pembiayaan pendidikan masyarakat miskin. (Nasrullah, 2015) menunjukkan bahwa dana filantropi yang dikelola BMH Malang telah membantu anak-anak dhuafa untuk mengenyam pendidikan melalui beasiswa dan pembangunan fasilitas belajar. Fakta ini memperlihatkan bahwa filantropi bukan sekadar bentuk kedermawanan, tetapi juga instrumen nyata dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.

Agar filantropi dapat memberikan dampak optimal, diperlukan sistem manajemen keuangan pendidikan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip filantropi ke dalam mekanisme pengelolaan dana. Sistem ini mencakup proses penghimpunan, pengelolaan, distribusi, serta pelaporan dana dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pengelolaan keuangan pendidikan berbasis filantropi dapat memanfaatkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Model triple helix collaboration menjadi relevan dalam konteks ini, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, masyarakat sebagai sumber dukungan dana, dan lembaga pendidikan sebagai pelaksana program yang berorientasi pada peningkatan mutu. Dengan mekanisme seperti ini, sumber pendanaan pendidikan tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga diperkuat melalui partisipasi masyarakat. Kolaborasi tersebut sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan karena masyarakat merasa terlibat langsung dalam proses peningkatan mutu dan pemerataan akses.

Transformasi digital juga memainkan peran penting dalam memperkuat manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi. Melalui platform digital seperti crowdfunding, aplikasi zakat online, dan sistem keuangan berbasis blockchain, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Masyarakat kini dapat menyalurkan donasi dengan mudah dan memantau penggunaan dana secara real-time. Widodo et al. (2023) menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan pendidikan meningkatkan kepercayaan publik karena data penggunaan dana dapat diakses secara terbuka. Selain itu, sistem digital mempercepat distribusi dana dan menekan potensi penyalahgunaan. Dengan adanya integrasi teknologi, lembaga pendidikan kecil seperti madrasah dan pesantren juga dapat mengelola bantuan dengan lebih profesional. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan nilai transparansi dan partisipasi publik dalam membangun keadilan pendidikan.

Meski demikian, penerapan manajemen keuangan berbasis filantropi tidak lepas dari tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan dan kemampuan manajerial di lembaga pendidikan, terutama di tingkat akar rumput. Banyak pengelola sekolah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang perencanaan keuangan, audit internal, dan pengawasan dana filantropi. Selain itu, belum adanya regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga filantropi menyebabkan implementasi di lapangan belum maksimal. (Muslikhin & Khoeruddin, 2023)

menyoroti bahwa penyalahgunaan dana pendidikan sering kali berakar pada lemahnya etika dan sistem pengawasan internal. Tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan publik yang konsisten. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi dapat menurun apabila terjadi pelanggaran etika atau ketidakterbukaan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem audit publik dan sertifikasi akuntabilitas yang menjamin transparansi lembaga pengelola dana filantropi pendidikan.

Dari perspektif nilai, pengelolaan keuangan pendidikan berbasis filantropi sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan (*adl*). (Fauzan et al., 2025) menegaskan bahwa manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus berlandaskan nilai moral dan spiritual. Artinya, setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Ketika nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam praktik manajemen keuangan, maka akan terbentuk sistem pendidikan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial. Nilai spiritual menjadi energi moral yang mendorong profesionalisme dan integritas dalam mengelola dana pendidikan. Dengan demikian, pengembangan sistem keuangan berbasis filantropi bukan hanya upaya teknokratis, tetapi juga bagian dari misi moral untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pendidikan.

Peran pemerintah tetap penting dalam mengorkestrasi seluruh potensi filantropi pendidikan agar berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah dapat menyediakan regulasi yang mempermudah sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga zakat, memberikan insentif pajak bagi donatur, serta memastikan mekanisme pelaporan dana publik berjalan transparan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar sumber dana pendidikan dapat diperluas, misalnya melalui kemitraan dengan dunia usaha dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Penguatan kelembagaan di tingkat sekolah juga sangat penting, seperti pembentukan unit khusus yang mengelola hubungan dengan lembaga filantropi dan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan dan tata kelola yang baik, filantropi pendidikan dapat menjadi sumber daya strategis untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, integrasi antara manajemen keuangan pendidikan dan prinsip filantropi tidak hanya menciptakan sistem pembiayaan alternatif, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kuat bagi pendidikan nasional. Filantropi mengubah paradigma pembiayaan pendidikan dari yang semula bersifat birokratis menjadi partisipatif dan inklusif. Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari pembangunan pendidikan, maka akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap masa depan bangsa. Dalam jangka panjang, sistem pendidikan yang dibiayai dan diawasi bersama antara pemerintah dan masyarakat akan lebih tangguh menghadapi tantangan globalisasi, krisis ekonomi, maupun perubahan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi bukan sekadar solusi teknis, melainkan strategi transformatif untuk membangun Indonesia yang lebih adil, cerdas, dan berkeadaban.

## **METODE PENELITIAN**

Proses telaah literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengadaptasi prinsip-prinsip *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) sebagai pedoman untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan proses peninjauan literatur. Adaptasi pedoman PRISMA berfungsi untuk memastikan bahwa langkah identifikasi, seleksi, evaluasi kualitas, dan ekstraksi data mengikuti alur kerja yang terstruktur, meskipun penelitian ini tidak menerapkan PRISMA secara penuh sebagaimana pada *systematic review* yang berskala luas. Pendekatan ini merujuk pada rekomendasi metodologis dari (Kitchenham, B., & Charters, 2007; Moher et al., 2009) mengenai pentingnya proses telaah literatur yang transparan dan dapat direplikasi.

Artikel yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari database akademik bereputasi, yaitu *Scopus* dan *Google Scholar*, yang diakses melalui bantuan aplikasi *Publish or Perish*.

Pemilihan kedua database tersebut didasarkan pada luasnya cakupan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik manajemen keuangan pendidikan dan filantropi. Meskipun penelitian ini tidak melakukan pencarian bebas ke berbagai database internasional, proses kurasi artikel tetap mengikuti prinsip sistematis dengan memeriksa relevansi topik, kontribusi teoretis, serta kebaruan temuan. Literatur yang digunakan mencakup publikasi rentang 2015–2025, yang dipilih untuk menangkap perkembangan terbaru dalam tata kelola keuangan pendidikan, dinamika filantropi pendidikan, dan transformasi digital pada lembaga pendidikan Islam.

Proses seleksi artikel dilakukan melalui penetapan kriteria inklusi dan eksklusi guna memastikan kesesuaian studi dengan fokus penelitian.

**Table 1.** Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tahun Publikasi	2015-2025	Jurnal Yang Kurang dari 2015-2025
Bahasa	Inggris dan Indonesia	Selain Bahasa Inggris dan Indonesia
Jenis Publikasi	Artikel Jurnal	Buku, <i>Book Chapter</i> , Dll
Akses	Akses Terbuka	Akses Tertutup
Ruang Lingkup Pembahasan	Tata kelola keuangan pendidikan, Filantropi pendidikan, Transformasi digital pada lembaga pendidikan Islam	Yang membahas selain Tata kelola keuangan pendidikan, Filantropi pendidikan, Transformasi digital pada lembaga pendidikan Islam

Sumber data penelitian ini mencakup jurnal artikel yang diterbitkan pada rentang tahun 2015–2025. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kesesuaian topik, keandalan sumber, dan kontribusinya terhadap teori manajemen keuangan serta filantropi pendidikan. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahap sistematis sebagaimana disarankan oleh (Miles, M.B., Huberman, a. m., & Saldana, 2015) dalam *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap awal, literatur relevan dikumpulkan dari berbagai basis data seperti Google Scholar dan Scopus. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan menyeleksi isi literatur berdasarkan kategori tematik, seperti sistem keuangan pendidikan, etika pengelolaan dana, model filantropi Islam, dan prinsip transparansi dalam pendidikan. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menemukan keterkaitan antar konsep serta pola hubungan antara manajemen keuangan dan praktik filantropi dalam konteks peningkatan akses serta kualitas pendidikan. Tahap akhir berupa sintesis teoritis bertujuan merumuskan model konseptual pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Proses analisis data dilakukan melalui empat tahapan sistematis. Pertama, pengumpulan literatur relevan dari berbagai basis data seperti Google Scholar dan Scopus. Kedua, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi isi literatur berdasarkan kategori tematik, seperti sistem keuangan pendidikan, etika pengelolaan dana, model filantropi Islam, dan prinsip transparansi dalam pendidikan. Ketiga, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menemukan keterkaitan antar konsep serta pola hubungan antara manajemen keuangan dan praktik filantropi dalam konteks peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Keempat, dilakukan sintesis teoritis guna merumuskan model konseptual pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Artikel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan publikasi ilmiah yang terbit pada rentang tahun 2015 hingga 2025. Dari kumpulan literatur yang tersedia, peneliti menyeleksi 18 artikel yang memiliki keterkaitan kuat dengan topik manajemen keuangan pendidikan, filantropi pendidikan, tata kelola lembaga pendidikan Islam, serta digitalisasi sistem keuangan. Setelah proses seleksi berdasarkan relevansi tema dan kontribusi konseptual, artikel-artikel tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tematik yang mencerminkan fokus penelitian,

seperti prinsip efisiensi dan akuntabilitas, nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana, model pembiayaan berbasis filantropi, dan peran teknologi digital dalam tata kelola keuangan pendidikan. Pengelompokan tematik ini menjadi dasar dalam penyusunan sintesis literatur dan pengembangan model konseptual penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Integrasi prinsip filantropi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, memperoleh dukungan pendanaan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tantangan keterbatasan anggaran, tetapi juga memperkuat partisipasi publik serta menumbuhkan tanggung jawab sosial dalam mendukung akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Data hasil penelitian yang dianalisis dalam artikel ini berupa sintesis, analisis tematik, dan rangkuman dari 18 artikel ilmiah yang didokumentasikan dan berkaitan langsung dengan manajemen keuangan pendidikan, praktik filantropi, nilai-nilai syariah dalam tata kelola dana, serta digitalisasi sistem keuangan pada lembaga pendidikan Islam. Seluruh artikel tersebut digunakan untuk menggali konsep, model, serta temuan empiris yang relevan sehingga dapat membentuk dasar pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan akses serta kualitas pendidikan.

**Tabel 2.** Temuan Utama Berdasarkan Kategori Tema

No.	Penulis (Tahun)	Fokus Temuan Utama	Tema
1	(Fauzan et al., 2025)	Merekonstruksi manajemen biaya pendidikan Islam dengan menekankan efisiensi, transparansi, dan etika syariah.	Etika, Transparansi, dan Manajemen Berbasis Syariah
2	(Hasanah & Nuraidah, 2024)	Pembiayaan pendidikan yang efektif meningkatkan kualitas SDM, hasil belajar siswa, dan kinerja guru.	Pembiayaan dan Kualitas Pendidikan
3	(Istikomah & Minarti, 2025)	Manajemen keuangan yang kuat berkorelasi dengan kualitas kelembagaan pendidikan Islam yang tinggi.	Manajemen Keuangan & Kualitas Lembaga
4	(Junaidi et al., 2025)	Mengusulkan model pembiayaan inklusif yang selaras dengan SDGs melalui kolaborasi sekolah-LAZ.	Pembiayaan Inklusif & SDGs
5	(Komariah, 2018)	Menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan pendidikan.	Manajemen Keuangan Dasar
6	(Laila et al., 2025)	Pengelolaan dana filantropi meningkatkan mutu sekolah melalui distribusi dana yang terstruktur.	Filantropi & Mutu Sekolah

No.	Penulis (Tahun)	Fokus Temuan Utama	Tema
7	(Ikhsan et al., 2025b)	Mengusulkan model strategis untuk meningkatkan pembiayaan dan diversifikasi sumber dana.	Model Pembiayaan Strategis
8	(Miles, M.B., Huberman, a. m., & Saldana, 2015)	Kerangka analisis kualitatif: pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Kerangka Analisis Kualitatif
9	(Rosadi, 2020)	Menyediakan landasan metodologi penelitian kualitatif.	Metodologi Kualitatif
10	(Muslikhin & Khoeruddin, 2023)	Mengidentifikasi isu etika dalam keuangan sekolah: penyalahgunaan dan lemahnya supervisi.	Isu Etika dalam Keuangan Sekolah
11	(Nasrullah, 2015)	Pengelolaan dana ZIS yang efektif untuk beasiswa dan infrastruktur pendidikan di BMH.	Filantropi & Pemberdayaan Pendidikan
12	(Ningsih et al., 2021)	Pemberdayaan pendidikan anak yatim melalui pengelolaan dana filantropi Yatim Mandiri.	Pemberdayaan Dana Filantropi
13	(Suharto, 2021)	Filantropi sebagai mekanisme keadilan sosial yang mengurangi ketimpangan.	Filantropi & Keadilan Sosial
14	(Syaifullah, 2021)	Prinsip inti: penganggaran, efisiensi, dan tata kelola di tingkat sekolah.	Prinsip Manajemen Keuangan
15	(Sugiyono, 2019)	Mendefinisikan metodologi penelitian utama dalam studi pendidikan.	Fondasi Metodologi Penelitian
16	(Trihantoyo, 2020)	Mengkaji praktik supervisi dan tata kelola keuangan pendidikan.	Tata Kelola Keuangan Praktis
17	(Wahyudin, 2021)	Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip inti keuangan pendidikan.	Prinsip Tata Kelola
18	(Widodo et al., 2023)	Sistem digital memungkinkan pelaporan real-time dan meningkatkan kepercayaan publik.	Manajemen Keuangan Digital

Hasil telaah terhadap 18 artikel menunjukkan bahwa pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi berdiri di atas empat pilar utama: Integrasi Prinsip Manajemen Keuangan dan Filantropi, Digitalisasi dan Akuntabilitas Filantropi Pendidikan, Etika dan Nilai Syariah sebagai Dasar Sistem, dan Model Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Filantropi Pendidikan. Seluruh artikel memberikan kontribusi tematik yang saling melengkapi dan memperkuat model konseptual dalam penelitian ini.

### **Integrasi Prinsip Manajemen Keuangan dan Filantropi**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi menuntut integrasi antara prinsip-prinsip manajerial modern dan nilai-nilai sosial keagamaan. Empat prinsip utama yang ditemukan dari berbagai sumber literatur adalah efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai pondasi yang menjamin keberlanjutan dan kredibilitas lembaga pendidikan, terutama dalam konteks pembiayaan yang bersumber dari filantropi masyarakat.

Menurut (Istikomah & Minarti, 2025), efektivitas manajemen keuangan merupakan determinan langsung terhadap mutu pendidikan, baik dalam hal alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun perencanaan strategis jangka panjang. Prinsip efisiensi menekankan pentingnya penggunaan dana untuk kegiatan prioritas pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, perbaikan fasilitas, dan dukungan terhadap peserta didik dari keluarga tidak mampu. Transparansi menjadi jembatan yang menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan karena memungkinkan para donatur dan masyarakat mengetahui bagaimana dana dikelola dan digunakan.

Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika publik. Setiap pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan harus dapat diaudit secara terbuka. Prinsip keempat, partisipasi publik, berfungsi sebagai instrumen demokratisasi pendidikan yang mengundang keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya dalam bentuk donasi tetapi juga dalam pengawasan dan perencanaan program.

Filantropi, sebagaimana ditegaskan oleh (Ikhsan et al., 2025), berperan sebagai komplementer strategis bagi sistem pembiayaan konvensional. Filantropi menyediakan sumber daya tambahan yang tidak bergantung pada subsidi pemerintah, sehingga memperluas akses dan menciptakan keberlanjutan finansial. Dalam konteks ini, sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial, spiritual, dan transformasional, karena mampu menggerakkan solidaritas kolektif masyarakat untuk membangun pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

### **Digitalisasi dan Akuntabilitas Filantropi Pendidikan**

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi faktor pengubah utama dalam manajemen keuangan pendidikan modern. Digitalisasi tidak hanya berperan dalam efisiensi administrasi keuangan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.

Menurut (Widodo et al., 2023), penerapan sistem keuangan digital berbasis cloud accounting memungkinkan lembaga pendidikan untuk melakukan pencatatan transaksi filantropi secara otomatis, akurat, dan mudah diakses. Melalui integrasi antara platform donasi daring, aplikasi pelaporan publik, dan sistem keuangan internal sekolah, lembaga pendidikan dapat menampilkan laporan real-time yang dapat diakses oleh donatur maupun masyarakat umum.

Sistem digital semacam ini meningkatkan akuntabilitas publik karena seluruh proses transaksi terekam secara digital dan dapat diaudit kapan saja. Keuntungan lainnya adalah efisiensi dalam proses administrasi, karena otomatisasi mengurangi beban kerja manual dan risiko kesalahan manusia (human error).

Hasil penelitian (Junaidi et al., 2025) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa teknologi digital berperan penting dalam mewujudkan pembiayaan pendidikan inklusif dan berkelanjutan, terutama di lingkungan pendidikan Islam. Dengan sistem digital, donasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai

prinsip syariah. Selain itu, data donatur dan penerima manfaat dapat dianalisis untuk mengoptimalkan distribusi dana secara adil dan tepat sasaran.

Digitalisasi juga menciptakan lingkungan keuangan yang kolaboratif antara lembaga pendidikan, lembaga amal zakat, dan korporasi melalui skema corporate social responsibility (CSR). Dengan demikian, peran teknologi bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan transformasi sosial yang memperluas jangkauan filantropi pendidikan.

### **Etika dan Nilai Syariah sebagai Dasar Sistem**

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi sangat dipengaruhi oleh penerapan etika dan nilai-nilai syariah dalam setiap tahap pengelolaan dana. Dalam konteks pendidikan Islam, pengelolaan dana filantropi tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus memenuhi tanggung jawab moral dan spiritual.

Menurut (Fauzan et al., 2025), rekonstruksi sistem manajemen biaya pendidikan perlu dilakukan berdasarkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kejujuran agar tercipta sistem keuangan yang bermoral dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut memastikan bahwa pengelolaan dana tidak menyimpang dari prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

Sementara itu, (Muslikhin & Khoeruddin, 2023) menyoroti munculnya berbagai isu etika dalam praktik pengelolaan dana di sekolah dasar, seperti penyelewengan, kurangnya transparansi, dan ketimpangan akses dana. Solusi yang mereka tawarkan adalah penerapan sistem etika berbasis nilai syariah, yang menempatkan pengelola dana sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan.

Penerapan etika syariah juga memperkuat prinsip keadilan distributif, di mana dana filantropi diarahkan untuk mendukung kelompok yang paling membutuhkan seperti siswa yatim, dhuafa, dan wilayah pendidikan tertinggal. Hal ini menciptakan sistem keuangan pendidikan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan spiritual.

### **Model Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Filantropi Pendidikan**

Berdasarkan hasil sintesis dari berbagai literatur dan analisis teoritis, model konseptual pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi dapat dijelaskan melalui empat komponen utama, yaitu input, proses, output, dan outcome.

- (1) Input: Sumber dana filantropi yang beragam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dan donasi digital menjadi fondasi utama. Diversifikasi sumber ini memperkuat stabilitas keuangan lembaga pendidikan dan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi pemerintah.
- (2) Proses: Pengelolaan dilakukan melalui sistem manajemen digital yang berbasis prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses ini mencakup perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi dana secara real-time.
- (3) Output: Hasil langsung dari sistem ini adalah meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dan perbaikan mutu pembelajaran.
- (4) Outcome: Dampak jangka panjangnya adalah keberlanjutan lembaga pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global.

Model ini sejalan dengan gagasan (Wahyudin, 2021) tentang pentingnya prinsip efisiensi dan transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan, serta mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 4 tentang "Pendidikan Bermutu untuk Semua."

### **Discussion**

Pengelolaan keuangan dalam dunia pendidikan merupakan salah satu aspek strategis yang menentukan arah dan mutu penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, permasalahan utama dalam pembiayaan pendidikan terletak pada ketimpangan sumber daya

antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, antara kota dan desa, serta antara lembaga formal dan nonformal. Sistem pembiayaan yang bergantung pada anggaran pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan karena faktor birokrasi, prioritas politik, dan kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendekatan alternatif yang bersumber dari partisipasi masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan. Salah satu pendekatan yang semakin relevan adalah filantropi pendidikan, yaitu gerakan sosial yang menggalang sumber daya publik untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Menurut (Istikomah & Minarti, 2025), efektivitas manajemen keuangan sangat menentukan mutu pendidikan, terutama dalam perencanaan, pengawasan, dan pengalokasian sumber daya. Manajemen keuangan yang kuat harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar penggunaan dana dapat diarahkan pada prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Namun, sistem pembiayaan konvensional di banyak lembaga pendidikan Islam nonformal, seperti madrasah dan pesantren kecil, masih lemah dari sisi perencanaan strategis dan tata kelola keuangan. Hal ini berdampak pada ketergantungan lembaga terhadap bantuan eksternal, seperti dana BOS atau sumbangan masyarakat yang tidak terstruktur.

Dalam kerangka ini, pengembangan sistem manajemen keuangan berbasis filantropi menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Filantropi bukan sekadar kegiatan donasi, tetapi mekanisme sosial-ekonomi yang mampu memperkuat otonomi lembaga pendidikan. Menurut (Ikhsan et al., 2025), filantropi dapat menjadi pelengkap strategis dalam sistem pembiayaan pendidikan karena menyediakan sumber dana alternatif yang tidak bergantung pada anggaran pemerintah. Prinsip ini memperkuat posisi lembaga pendidikan sebagai entitas yang mandiri dan mampu mengembangkan inovasi program berdasarkan kebutuhan kontekstualnya. Dalam praktiknya, dana filantropi bisa bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, corporate social responsibility (CSR), maupun donasi digital yang berkembang pesat di era teknologi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menegaskan efektivitas model filantropi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. (Nasrullah, 2015) menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS oleh BMH Malang mampu membiayai program beasiswa dan pembangunan sarana belajar bagi anak-anak dhuafa, sehingga akses mereka terhadap pendidikan formal menjadi lebih terbuka. Temuan ini sejalan dengan studi Junita, Dasuki, dan (Junita et al., 2023; Qosyim & Zarkasyi, 2024) yang membuktikan bahwa strategi pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam di lembaga pendidikan Islam memungkinkan penyediaan pendidikan gratis bagi yatim dan keluarga kurang mampu, sekaligus memperkuat kemandirian pendanaan lembaga dan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah pinggiran. Di sisi lain, (Aminah, 2025) memperlihatkan bahwa ekosistem filantropi pendidikan yang dibangun BAZNAS melalui program beasiswa, peningkatan infrastruktur, dan kolaborasi kelembagaan mampu mengubah zakat dari sekadar bantuan karitatif menjadi instrumen pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Secara konseptual, (Latief, 2016) dan sejumlah kajian tentang filantropi Islam dan keadilan sosial menegaskan bahwa praktik filantropi dalam pendidikan Islam tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah sosial yang bertumpu pada nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab kolektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pendidikan kelompok rentan.

Dalam aspek manajemen keuangan, prinsip efisiensi dan transparansi merupakan kunci utama agar sistem filantropi dapat dipercaya publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi pengelola. Akuntabilitas menjadi unsur penting lainnya karena menjamin bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika. Sejalan dengan pendapat (Wahyudin, 2021), sistem keuangan yang transparan dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi prasyarat bagi keberlanjutan lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, prinsip manajemen modern harus

diintegrasikan dengan nilai-nilai moral dan spiritual agar sistem pembiayaan berbasis filantropi memiliki fondasi yang kokoh.

Perkembangan teknologi digital menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas sistem keuangan filantropi pendidikan. Digitalisasi memungkinkan lembaga pendidikan mengelola, memantau, dan melaporkan penggunaan dana secara lebih cepat dan akurat. (Widodo et al., 2023) menyatakan bahwa penggunaan sistem cloud accounting dalam lembaga pendidikan berbasis filantropi mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Sistem ini memungkinkan laporan keuangan diakses secara daring oleh pihak donatur dan publik, sehingga meminimalisasi potensi penyalahgunaan dana. Lebih jauh, digitalisasi juga memperkuat komunikasi antara lembaga pendidikan dan para donatur melalui platform daring, aplikasi mobile, atau sistem e-reporting, yang membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses pemberian dan pengawasan dana.

Pandangan tersebut diperkuat oleh (Junaidi et al., 2025), yang menegaskan bahwa digitalisasi berperan besar dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sistem digital, lembaga pendidikan dapat memetakan penerima manfaat secara lebih akurat, sehingga dana filantropi dapat disalurkan tepat sasaran kepada siswa miskin, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), atau lembaga pendidikan yang kekurangan sumber daya. Teknologi digital juga memungkinkan terciptanya integrasi antara lembaga pendidikan, lembaga zakat, dan korporasi filantropi dalam satu ekosistem keuangan berbasis data. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya aspek administratif, melainkan juga strategi untuk memperkuat partisipasi publik dan memperluas dampak sosial dari gerakan filantropi pendidikan.

Selain aspek manajerial dan digital, dimensi etika dan nilai syariah menjadi unsur fundamental dalam sistem manajemen keuangan berbasis filantropi, terutama di lembaga pendidikan Islam. Pengelolaan dana pendidikan tidak hanya harus efisien dan efektif, tetapi juga harus bermoral dan sesuai dengan prinsip keadilan. (Fauzan et al., 2025) menekankan bahwa sistem manajemen biaya pendidikan yang berpijak pada nilai syariah menjamin terciptanya keadilan distributif dan menghindari praktik manipulasi. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keikhlasan merupakan fondasi moral yang membedakan sistem filantropi syariah dari sistem keuangan konvensional.

(Muslikhin & Khoeruddin, 2023) menyoroti bahwa praktik pengelolaan dana pendidikan yang tidak dilandasi etika sering kali menimbulkan penyimpangan, seperti korupsi kecil, penggunaan dana tidak sesuai tujuan, dan ketimpangan alokasi sumber daya. Dengan menerapkan prinsip etika syariah, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa dana filantropi digunakan sesuai niat awal pemberi, yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan penerima manfaat. Nilai-nilai syariah juga menumbuhkan rasa tanggung jawab spiritual pada pengelola dana karena mereka sadar bahwa setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa penerapan etika syariah dalam pengelolaan keuangan mampu meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. (Fathoni & Kurniawan, 2022) menemukan bahwa praktik akuntansi syariah yang menekankan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Islam. Temuan ini diperkuat oleh (Ardiansyah, 2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berbasis nilai syariah pada lembaga pendidikan Islam berdampak pada meningkatnya legitimasi publik dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian (Widodo et al., 2023) menunjukkan bahwa integrasi sistem pelaporan digital pada lembaga pendidikan berbasis syariah meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan.

Filantropi pendidikan juga memiliki dimensi sosial yang luas. Studi (Qosyim & Zarkasyi, 2024) menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam di sebuah pesantren memungkinkan penyelenggaraan pendidikan gratis bagi anak yatim dan

keluarga kurang mampu, sekaligus memperkuat kemandirian finansial lembaga. Di tingkat yang lebih makro, kajian bibliografis (Adinugraha, 2025) dan analisis SDGs filantropi oleh (Bari et al., 2024) menunjukkan bahwa filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang mendorong pemberdayaan, pengurangan kesenjangan, dan perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan. Dalam konteks ini, sistem keuangan berbasis filantropi membangun solidaritas sosial yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat dalam proyek kebaikan bersama, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan sosial terhadap lembaga pendidikan dan memperkuat kohesi sosial.

Dalam perspektif kebijakan publik, filantropi pendidikan sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas untuk semua. (Arwani et al., 2024) menegaskan bahwa zakat dan instrumen keuangan sosial Islam berpotensi besar mendukung pencapaian berbagai indikator SDGs, termasuk perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Kajian (Adinugraha et al., 2025; Laksono et al., 2023) menunjukkan bahwa pendanaan berbasis filantropi mampu mengisi celah pendanaan yang belum terjangkau kebijakan negara melalui skema kemitraan antara pemerintah, lembaga filantropi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi multi-pihak semacam ini terbukti menjadi salah satu strategi efektif untuk menjaga keberlanjutan finansial lembaga pendidikan di negara berkembang sekaligus memperkuat legitimasi sosial program pendidikan berbasis filantropi.

Model konseptual yang dihasilkan dari sintesis berbagai penelitian menggambarkan bahwa sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi dapat dipahami melalui empat komponen utama: input, proses, output, dan outcome. Pada tahap input, sumber dana filantropi berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dan donasi digital. Tahap proses melibatkan penerapan sistem manajemen digital dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Tahap output meliputi peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, serta perbaikan mutu pembelajaran. Sedangkan tahap outcome adalah terciptanya keberlanjutan lembaga pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Model ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan realitas lembaga pendidikan di Indonesia.

Banyak penelitian mutakhir mendukung gagasan bahwa kombinasi antara manajemen keuangan modern, nilai syariah, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi formula efektif untuk sistem filantropi pendidikan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, (Arrazaq, 2023) menunjukkan bahwa filantropi pendidikan Islam di Indonesia mengalami percepatan signifikan ketika lembaga menggunakan media sosial dan platform digital untuk kampanye zakat/infak/wakaf, sehingga partisipasi donatur meningkat dan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan lebih meluas. Lebih jauh, penelitian oleh (Ridho et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi sistem manajemen keuangan berbasis digital pada institusi pendidikan Islam termasuk pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel secara nyata memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga. Di sisi pembiayaan konkret, studi (Junita et al., 2023) menunjukkan bahwa pengelolaan filantropi terutama melalui wakaf dan infaq dapat digunakan untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak yatim dan keluarga kurang mampu, membuktikan bahwa filantropi Islam bukan sekadar bantuan sosial jangka pendek, melainkan instrumen akses pendidikan yang nyata bagi kelompok marjinal. Selain itu, (Safingah et al., 2025) dalam kajiannya menunjukkan kontribusi filantropi terhadap pengembangan kapasitas serta kualitas lembaga pendidikan agama, mendukung keberlanjutan dan daya tampung pendidikan berbasis agama di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi tidak hanya menyangkut aspek pengumpulan dana, tetapi juga pengelolaan, pelaporan, dan pelibatan masyarakat dalam seluruh proses. Filantropi menjadi paradigma baru dalam pembiayaan pendidikan yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai spiritual. Sistem ini menempatkan pendidikan bukan semata sebagai tanggung jawab negara, tetapi sebagai amanah bersama seluruh elemen masyarakat.

Untuk mendukung keberlanjutan sistem ini, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memberikan dukungan regulatif berupa insentif pajak bagi individu atau perusahaan yang menyalurkan dana filantropi ke sektor pendidikan. Kedua, lembaga pendidikan harus memperkuat kapasitas manajerialnya melalui pelatihan akuntansi filantropi dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Ketiga, perlu dikembangkan sistem audit independen agar akuntabilitas pengelolaan dana dapat terjaga. Keempat, pendidikan nilai dan etika filantropi harus ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah agar generasi muda memahami makna berbagi dan tanggung jawab sosial.

Integrasi antara manajemen keuangan, teknologi digital, dan nilai-nilai filantropi menandai munculnya paradigma baru dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan pendanaan, tetapi juga membangun sistem yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Wahyudin, 2021), manajemen keuangan yang efisien dan transparan merupakan prasyarat utama peningkatan mutu pendidikan. Dengan menambahkan dimensi filantropi dan nilai-nilai syariah, sistem keuangan pendidikan dapat berkembang menjadi instrumen transformasi sosial yang memperkuat karakter bangsa.

Oleh karena itu, pengembangan sistem manajemen keuangan berbasis filantropi bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga gerakan moral dan sosial untuk menegakkan keadilan dalam pendidikan. Sistem ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, antara lembaga maju dan tertinggal, serta antara pusat dan daerah. Ketika filantropi menjadi bagian integral dari sistem keuangan pendidikan, maka cita-cita pendidikan untuk semua (*education for all*) bukan lagi sekadar slogan, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan bersama melalui semangat solidaritas, transparansi, dan keberlanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan berbasis filantropi merupakan strategi penting untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pendidikan di Indonesia, khususnya pada lembaga pendidikan Islam nonformal dan wilayah 3T. Ketergantungan penuh terhadap anggaran pemerintah terbukti belum mampu menjamin pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sehingga diperlukan alternatif pendanaan melalui partisipasi publik dan penguatan instrumen filantropi berbasis nilai-nilai keagamaan dan sosial.

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi fondasi utama dalam membangun sistem manajemen keuangan yang kredibel dan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial memperkuat legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Di sisi lain, digitalisasi sistem keuangan filantropi melalui platform daring, cloud accounting, dan pelaporan real-time terbukti meningkatkan efektivitas tata kelola, memperluas jaringan donasi, dan mempercepat distribusi dana secara tepat sasaran.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana filantropi yang terkelola secara profesional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan bagi kelompok rentan, perbaikan fasilitas belajar, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta inovasi pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, filantropi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pendanaan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi filantropi, dan sektor swasta melalui skema pendanaan bersama, insentif kebijakan, dan audit publik independen. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas model manajemen keuangan berbasis filantropi secara empiris melalui studi kasus atau

pendekatan kuantitatif, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. (2025). Islamic Philanthropy in Indonesia: A Bibliographic Analysis. *PROFETIK: Journal of Islamic Philanthropy and Social Welfare*, 4(1), 1–24. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/article/view/14706>
- Aminah, L. (2025). Building an Educational Philanthropy Ecosystem: BAZNAS' Contribution Model in Indonesia. *Journal of Social Research*, 4(8), 1672–1682. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i7.2659>
- Ardiansyah, A. (2021). Implementasi Etika Syariah dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal ISEMA: Islamic Educational Management*, 6(1), 72–84. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isema/article/view/24091>
- Arrazaq, Z. (2023). Filantropi Pendidikan Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Era Transformasi Digital di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(3), 505–522. <https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i3-9>
- Arwani, A., Muhammad, R., & Mahmudi, M. (2024). Sustainable development and Islamic philanthropy: Synergy of zakat and SDGs. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 124–160. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v8n1.p124-160>
- Bari, A., Sholihah, S., Badruzzaman, A., & Matnin, [Nama Depan Matnin jika ada]. (2024). Analisis Sustainable Development Goals (SDGs) Filantropi Cilik Di LAZISMU Pamekasan. *JESPB: Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 164–174. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1297>
- Fathoni, A., & Kurniawan, D. (2022). Pengaruh Akuntansi Syariah terhadap Transparansi dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Keuangan Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 145–160. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/jas/article/view/7486>
- Fauzan, A., Utami, D. R., Noviarita, H., & Romlah. (2025). Rekonstruksi Konsep Manajemen Biaya Dalam Pendidikan Islam: Analisis Efisiensi, Transparansi, Dan Nilai Syariah. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 845–860. <https://scholar.google.com/scholar?q=Rekonstruksi+konsep+manajemen+biaya+Fauzan+2025>
- Hasanah, F., & Nuraidah, S. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. *AL FUTU: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 1–15. <https://link-jurnal-jika-ada/hal-artikel>
- Ikhsan, S. M., Kurniady, D. A., Yuniarsih, T., & Abubakar. (2025a). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Strategi dan Model dalam Meningkatkan Mutu*. Indonesia Emas Group.
- Istikomah, Y., & Minarti, S. (2025). Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kualitas Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kepustakaan. *Journal of Global Humanistic Studies Philosophiamundi.Id e-Issn*, 3(3), 3031–7703. <https://scholar.google.com/scholar?q=Istikomah+Minarti+2025+manajemen+keuangan>
- Junaidi, E., Lael, M. Z., Shaleh, & Husin, S. (2025). Model Pembiayaan Pendidikan Inklusif: Menuju Tercapainya SDGs di Sektor Pendidikan Islam Indonesia. *Al-Munadzomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 120. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/al-munadzomah/article/view/1464>
- Junita, S., Dasuki, Moh., & Al-Haj, Z. (2023). Strategic Utilization of Islamic Philanthropy in Education Financing: An Investigation into Orphan Empowerment. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 39–58. <https://doi.org/10.14421/manageria.81-03>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. In *Technical report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE* (Issue January 2007). Evidence-Based Software Engineering (EBSE). [https://www.elsevier.com/\\_data/promis\\_misc/525444systematicreviewsguide.pdf](https://www.elsevier.com/_data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf)

- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Al-Afkar : Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 67–94. <https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192>
- Laila, R. N., Bunyamin, & Rasiman. (2025). Manajemen Filantropi untuk Meningkatkan Mutu Sekolah di SMK Raden Umar Said Kudus. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 12(1), 392–399. <https://scholar.google.com/scholar?q=Laila+Raden+Umar+Said+Kudus+2025>
- Laksono, G. E., Haniati, U., & Sulaeman, Y. A. (2023). The Role of Islamic Philanthropy and Sustainable Development (SDGs) Achievements in Kebumen Regency, Central Java. *International Conference on Islamic Philanthropy Proceedings*, 1(1), 197–203. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.849>
- Latief, H. (2016). Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 123–139. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>
- Liyana, N. F. (2023). The Effect Of Educational Inequality On Economic Growth In Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 144–153. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2259>
- Manik Sidauruk, J., Susilowati, M., & Karimullah Akbar, K. (2025). *Indonesia's Struggle with Education Inequality: Is Reform the Answer?* (pp. 59–84). <https://doi.org/10.15294/indi.v2i1.23035>
- Miles, M.B., Huberman, a. m., & Saldana, J. (2015). Qualitative Data A Methods Sourcebook. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2). Sage Publications. <https://scholar.google.com/scholar?q=Miles+Huberman+Saldana+2018+Qualitative+Data+Analysis>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. In *Journal of clinical epidemiology* (Vol. 62, Issue 10). <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005>
- Mujiburrohmah, & Putri, D. (2024). The Impact of Social Inequality on Educational Quality in Indonesia: Challenges and Policy Recommendations. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, 3(01), 43–56. <https://doi.org/10.61455/sujiem.v3i01.248>
- Muslikhin, M., & Khoeruddin, L. A. (2023). Isu Etika dalam Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar: Pertimbangan dan Solusi. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2), 239–253. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v2i2.222>
- Muttaqin, T. (2020). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia Tatang Muttaqin 1 Ministry of National Development Planning/BAPPENAS 2 Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Development Planning. *Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 1–22. <https://unnes.ac.id/berita/diapresiasi-publik-raeni-peroleh-tawaran-beasiswa-s2-ke-inggris/>
- Nasrullah, A. (2015a). Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Bmh Cabang Malang Jawa Timur). *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i1.377.1-18>
- Nasrullah, A. (2015b). Pengelolaan dana pendidikan untuk pemberdayaan anak dhuafa: Studi kasus BMH Malang. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(1), 1–18. <https://scholar.google.com/scholar?q=Nasrullah+2015+pengelolaan+dana+pendidikan+B+MH>
- Ningsih, I. W., Nurasa, A., Sobron M, D., Syah, M., & Erihadiana, M. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Lembaga Filantropi Yatim Mandiri dalam Pemberdayaan Mahasiswa Yatim (Study Analisis Program MEC). *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 859–869. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.357>
- Pugu, melyana r, Elmiwati, & Rukimin. (2025). Educational Inequality in Indonesia : a Policy Study and Evaluation of. *Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 5.
- Qosyim, R. A., & Zarkasyi, A. (2024). Management of Islamic Philanthropy-Based Education Financing in Increasing Access to Free Education for Orphans Children. *Munaddhomah*:

- Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 270–283.  
<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v5i3.1137>
- Ridho, H., Sodikin, A., & Mujib, A. (2025). The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023). *Al-Ahkam*, 35(1), 31–58.  
<https://doi.org/10.21580/AHKAM.2025.35.1.23721>
- Rosadi, S. (2020). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat Badan Amil Zakat Rokan Hulu. *Jurnal Hukum Islam*, 3(3), 95–113.
- Safingah, K., Nurchamidah, & Nurlaela. (2025). The Role of Islamic Philanthropy in the Development of Religious Education: A Contemporary Literature Review. *Journal of Research in Islamic Education*, 7(2), 699–711. <https://doi.org/10.25217/jrie.v7i2.6581>
- Simanjuntak, P. N., Simangunsong, M., & Utara, U. S. (2024). KETIMPANGAN DISTRIBUSI KARTU INDONESIA PINTAR: SEBUAH KAJIAN TERHADAP AKSES DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora (A H K A M)*, 3, 803–812.  
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i4.4251>
- Sugiyono, A. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.  
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sugiyono+2019+Metode+Penelitian+Pendidikan>
- Suharto, E. (2021). Kemiskinan dan Akses Pendidikan: Studi Empiris di Indonesia. In *Jurnal Pendidikan Sosial* (Vol. 15, Issue 2). UIN Press.
- Trihantoyo, S. (2020). *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Pustaka Aksara.  
[https://books.google.com/books/about/Manajemen\\_Keuangan\\_Pendidikan.html?id=oPU8EAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Manajemen_Keuangan_Pendidikan.html?id=oPU8EAAAQBAJ)
- Wahyudin, U. R. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas). In *Jurnal Administrasi Pendidikan: Vol. XIV* (Issue 1). Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=VHBREQAAQBAJ>
- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, N., & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka. In *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* (Vol. 1, Issue 2, pp. Fitriana, A., Yasila, E., Anggraeni, I. G., Febrianti, I., Haerani, S., & Rahim, S. W. (2025). The Distinction of Urban and Rural Education in Primary Schools. *Journal of Educational Studies Venda*, 2, 68–77.  
<https://ejournal.baleliterasi.org/index.php/IEs>

## BIODATA PENULIS KORESPONDEN



Mushthofa Abdul Majiid merupakan penulis koresponden yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Ia memiliki pengalaman kerja di berbagai lembaga pendidikan formal dan berbasis keislaman, antara lain Nurul Fikri Islamic Boarding School Serang, MIN 12 Cibubur, MTsN 7 Jakarta Timur, dan MTs Malahayati Jakarta Timur. Pengalaman tersebut membentuk kompetensi profesionalnya dalam bidang manajemen pendidikan dan praktik pengelolaan lembaga pendidikan. Untuk keperluan korespondensi, penulis dapat dihubungi melalui nomor HP/WhatsApp 087874804881.